

Mulyanto Nilai Permintaan Pemerintah Naikan Harga BBM di Salah Satu SPBU Swasta Berlebihan

Updates. - JEJAKPOLITISI.COM

Sep 5, 2022 - 18:06



Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

JAKARTA - Anggota Komisi VII [DPR RI Mulyanto](#) mengungkapkan Pemerintah tidak berhak dan berwenang mengatur harga bawah [BBM](#) non subsidi dari operator swasta. Permintaan pemerintah yang mendesak SPBU Vivo menaikkan

harga [BBM](#) Revvo 89 yang sebesar Rp8.900 per liter itu sebagai tindakan lebay alias berlebihan.

"Harga [BBM](#) yang murah itu kan menguntungkan masyarakat. Di tengah harga [BBM](#) subsidi Petalite RON 90 yang seharga Rp10.000 per liter," ungkap [Mulyanto](#) kepada wartawan, Senin (5/9/2022). Ia pun minta Pemerintah membuka data harga pokok produksi (HPP) [BBM](#) bersubsidi yang berlaku selama ini.

Ia merasa ada yang aneh terkait kebijakan kenaikan harga [BBM](#) bersubsidi dua hari lalu. Pasalnya, pada saat yang sama harga [BBM](#) non subsidi di Pertamina, Shell dan Vivo malah diturunkan, menyusul anjloknya harga minyak dunia. Namun [BBM](#) jenis Revvo 89 yang harga sebelumnya Rp9.290 per liter malah turun menjadi Rp8.900 per liter. Akibatnya masyarakat menyerbu SPBU Vivo.

Melihat perbedaan harga jual tersebut, Politisi dari Fraksi [PKS](#) ini meminta Pemerintah untuk menjelaskan, kenapa harga jual Peralite yang bersubsidi malah lebih mahal dari [BBM](#) non subsidi Revvo 89.

"Ini kan janggal. Pemerintah harus dapat menjelaskan berapa harga pokok produksi (HPP) Peralite ini yang sebenarnya. Masa harganya masih lebih mahal daripada harga [BBM](#) di SPBU swasta. Selisih harga ini pasti akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat," kata Mulyanto.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar objektif menghitung harga pokok produksi dan harga keekonomian [BBM](#), semestinya tidak ada alasan untuk menaikkan harga [BBM](#) jenis apapun. Karena harga minyak dunia terus anjlok hingga USD89 per barel.

Sementara Pemerintah dan DPR sudah sepakat menetapkan asumsi makro harga minyak dunia sebesar USD100 per barel. "Artinya, fluktuasi harga minyak dunia masih dalam batas kemampuan anggaran negara. Dengan demikian Pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan harga [BBM](#) bersubsidi," tegasnya. (ayu/aha)